

# INDONESIA DALAM TATANAN PERUBAHAN PERDAGANGAN BERAS DUNIA

Oleh  
M. Husein Sawit

## PENDAHULUAN

Asia tetap masih mendominasi dalam bidang produksi, konsumsi dan perdagangan beras dunia. Produksi padi Indonesia mengambil pangsa sekitar 9% dari total produksi dunia. Indonesia negara penghasil beras ke tiga terbesar di dunia, setelah China (30%) dan India (21%). Namun, ke dua negara terakhir adalah net eksportir beras, berbeda dengan Indonesia yang mejadi negara net importir beras sejak akhir 1980an.

Indonesia terus berusaha mendorong peningkatan produksi beras dalam negeri dan mengelola stok beras nasional untuk tujuan emerjensi dan stabilisasi harga. Produksi beras/padi dalam negeri amat penting untuk menghindari tingginya risiko ketidakstabilan harga dan suplai beras dari pasar dunia, disamping terkait erat dengan usaha pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan.

Kebijakan peningkatan produksi dan mempertahankan *reserve-stock* beras, tetap ditempuh oleh banyak negara Asia, baik negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, maupun negara berkembang, seperti Filipina dan Bangladesh. Hal yang sama untuk negara net eksportir seperti Thailand, Vietnam, India maupun oleh negara net importir seperti Indonesia, Filipina dan Sri Lanka.

Pada tahun 2001, Indonesia berhasil merancang kebijakan perberasan yang konprehensif, tidak hanya berfokus pada subsidi harga input atau output. Inilah yang kemudian melahirkan Instruksi Presiden (Inpres) Perberasan baru, mulai dari Inpres no.9/2001 yang berlaku 1 Januari 2002, dan terakhir Inpres no.13/2005 yang berlaku 1 Januari 2006.

Salah satu diktum yang diatur disana adalah penetapan impor dan ekspor beras dalam kerangka menjaga kepentingan petani dan konsumen; serta impor manakala ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi. Diktum ini bermakna bahwa, perlindungan terhadap petani diutamakan. Rasionalnya adalah karena harga beras murah di pasar dunia tidak merefleksikan tingkat efisiensi, namun telah terdistorsi oleh berbagai bantuan dan subsidi. Hasil penelitian Husein Sawit dan Rusastra (2005) memperlihatkan bahwa hampir 80% pendapatan petani padi di negeara kaya kelompok OECD misalnya, berasal dari supor pemerintah. Oleh karena itu, adalah tidak adil buat petani padi/beras, yang sebagian besar petani sempit untuk bersaing dalam dunia perdagangan yang amat tidak adil itu.

Perlindungan dari serbuan impor, tidak terkecuali beras dapat ditempuh dengan dua cara yaitu hambatan TB (*tariff barrier*) dan hambatan NTB (*non tariff barrier*). Instrumen yang paling primitif dalam NTB adalah pelarangan impor atau pelarangan ekspor. Namun, ada juga yang menempuh kebijakan monopoli dan penetapan kuota impor untuk mengelola impor/ekspor suatu produk.

Hambatan TB dianggap paling transparan, sehingga semua hambatan NTB wajib dihapus dan dikonversikan ke dalam TB sesuai dengan ketentuan perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO). Indonesia telah menotifikasikan tarif

beras di WTO sebesar 180% dan diturunkan menjadi 160% untuk 2004, membuka pasar minimum (*minimum market access*) sebesar 70 ribu ton/tahun dengan tingkat tarif dalam kuota (*in-quota tariff*) 90%.

Mulai Januari 2000, pemerintah menetapkan tarif spesifik sebesar Rp 430/kg atau setara dengan 30% *ad valorem*. Impor dikontrol ketat, misalnya harus melalui “jalur merah” guna mencegah penyelundupan. Kemudian, sejak Januari 2004, pemerintah menutup impor beras, diperkirakan akan terus dipertahankan hingga akhir tahun ini. Kebijakan NTB ini memang kurang kompatibel dengan tatanan perdagangan multilateral, regional maupun bilateral.

Pertanyaannya adalah apakah dengan pelarangan impor, Indonesia telah mampu mencegah penyelundupan? Bagaimana perubahan perdagangan beras dunia? Adakah risiko pelarangan impor beras terhadap spekulasi harga serta stabilisasi harga beras dalam negeri? Tulisan ini mencoba menjawabnya.

### **KEBIJAKAN SUBSIDI KEPADA PETANI DI AMERIKA SERIKAT (AS), UNI EROPA (UE) DAN THAILAND**

Produksi padi dunia ditaksir mencapai 628 juta ton (FAO, 2006), 96% bertumpuk di NB (negara berkembang). Asia mengambil peran hampir 91% dari total produksi padi dunia. Impor dan ekspor beras juga terkonsentrasi di Asia. Negara eksportir beras yang terpenting diantaranya adalah Thailand, Vietnam, India, Pakistan dan China. Ke lima negara Asia ini mengambil pangsa ekspor dunia sebesar 75% pada 2004. Negara eksportir beras di NM (negara maju) adalah AS dan UE.

Pangsa impor Asia mencapai sekitar 45% dari beras yang diperdagangkan di pasar dunia, selebihnya tersalurkan ke benua lain terutama ke Afrika dan Amerika Tengah. Negara importir beras yang terbesar di Asia adalah Filipina, Bangladesh, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Malaysia dan Korsel.

Perdagangan beras dunia memang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dalam periode 2000-2005 misalnya, jumlah beras yang diperdagangkan antara 24 -28 juta ton, atau sekitar 7% dari total produksi. Bandingkan dengan 1994 misalnya, hanya sekitar 15 juta ton. Volume perdagangannya telah naik hampir dua kali lipat. Namun, apabila dibandingkan dengan presentase volume perdagangan serialia lainnya, beras adalah paling rendah. Kedelai, gandum dan jagung misalnya, volume yang diperdagangkan di pasar dunia mencapai masing-masing 30%, 20% dan 15%. Oleh karena itu, pasar beras dunia digolongkan tipis (*thin market*).

Disamping itu, negara eksportir, terutama Vietnam, Thailand dan India masih tetap mempertahankan kebijakan pembatasan ekspor beras, manakala produksi dan stok beras dalam negeri merosot tajam serta stabilitas harga terancam. Dengan alasan itulah, maka pasar beras dunia sering disebut sebagai pasar sisa (*residual market*). Dua ciri itulah yang membedakan perdagangan beras dengan perdagangan serialia atau pangan lainnya di pasar dunia.

Hampir semua negara eksportir maupun importir menyubsidi petani mereka dengan berbagai cara, mulai dari jaminan harga, subsidi input maupun berbagai bentuk subsidi lainnya. Diantara yang terpenting adalah menutup pasar dengan berbagai cara, namun sejalan dengan perdagangan multilateral. Kita simak saja UE dan AS, dua negara maju yang peran ekonomi beras dalam ekonomi nasional mereka amat kecil, namun proteksinya luar biasa besarnya. Simak juga perubahan kebijakan beras di negara eksportir penting dunia yaitu Thailand, seperti yang akan dibahas berikut ini.

EU memproduksi tidak lebih dari 3 juta ton padi, namun menutup pasar untuk melindungi industri padi/berasnya. Diterapkan kebijakan tarif kuota untuk padi/gabah dan periode waktu impor serta tarif eskalasi untuk beras. Tarif spesifik untuk padi/gabah

ditetapkan dengan 3 kelompok berdasarkan jumlah impor. Pada volume impor kurang dari 186.013 ton, maka tingkat tarif sebesar €30/ton. Apabila impor antara 186.013-251.665 ton, maka tingkat tarif dinaikan menjadi €42.5/ton. Selanjutnya, apabila volume impor melebihi 251.665 ton, maka tarif ditetapkan tinggi yaitu €65/ton. Periode imporpun dibatasi, hanya 6 bulan yaitu Maret sampai dengan Agustus (FAO 2006, FAO 2005a).

UE menerapkan tarif spesifik lebih tinggi untuk beras/beras pecah kulit dibandingkan untuk padi. Impor beras dibuka untuk periode 6 bulan (1 Maret -31 Agustus), dengan pengelompokkan volume impor. Apabila volume impor beras kurang dari 182.239 ton, maka tingkat tarif sebesar €145/ton. Namun, apabila impor beras melebihi 182.239 ton, maka tingkat tarif impor dinaikan menjadi €175/ton (FAO 2006, FAO 2005a).

AS adalah negara net eksportir beras penting di dunia. Ekspor beras AS berkisar antara 3-4 juta ton/tahun atau lebih dari separoh dari total produksi sekitar 7 juta ton/tahun. Pada musim panen 2006, petani AS menerima subsidi langsung sebesar US\$ 79,7/ton padi. Berbagai bentuk subsidi yang diterima petani, seperti *countercyclical payment*, harga minimum dan kredit pemasaran. Pada tahun 2005/06, besaran subsidi tersebut dan ditambah dengan harga musiman, maka petani padi AS memperoleh bantuan mencapai US\$ 250/ton padi. Bandingkan dengan harga beras 25% FOB Bangkok US\$263/ton beras (FAO 2006).

Thailand adalah negara eksportir utama beras di dunia atau sekitar 7 juta ton/tahun, telah merancang strategi baru untuk periode 2002-06. Pemerintah Thailand menyediakan dana US\$2 milyar untuk pembangunan silo, promosi riset dan pengembangan, serta stabilisasi harga. Pemerintah menaikkan harga minimum (*support price*) dalam kerangka skim pengadaan melalui pegadaian padi. Pada periode 2002-2003, karena harga beras jatuh, maka banyak petani menjual padinya pada lembaga-lembaga pengadaan padi, yang mencapai 5,6 juta ton. Petani tidak menebus padi yang telah digadaikan kepada pemerintah. Sejak 2004, pemerintah menaikkan harga minimum padi/beras menjadi US\$ 156/ton padi (5% broken) dan US\$ 239/ton untuk beras kualitas tinggi Jasmine (*fragrant rice*), FAO (2005b). Bandingkan dengan harga HPP (harga pembelian pemerintah) di Indonesia untuk 2006 mencapai US\$ 243/ton GKG atau US\$ 384/ton beras.

Pada bulan Nopember 2004, pemerintah Thailand membentuk Lembaga Beras Nasional (*National Rice Office*) yang bertanggung jawab terhadap usahatani padi, perdagangan dan riset. Departemen Pertanian dan Koperasi Thailand telah merancang strategi baru untuk pengembangan komoditas beras (2004-2008). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya. Ini adalah insentif non-harga (*non-price incentive*).

### **Kebijakan Perdagangan**

Pada periode krisis 1997-2000, pemerintah merubah secara radikal kebijakan beras nasional, karena tekanan *International Monetary Fund* (IMF). Indonesia terperangkap dengan hutang luar negeri yang besar, dan harus tunduk pada pemberi hutang yaitu IMF. Padahal kita tahu bahwa kebijakan pangan yang ditempuh Indonesia tidak terkait dengan krisis moneter.

Monopoli impor beras Bulog dicabut, impor dibebaskan tanpa bea masuk. Kredit KLBI (Kredit Likwiditas Bank Indonesia) dengan bunga subsidi dihapus, sehingga Bulog melaksanakan pengadaan beras untuk melindungi produsen dengan biaya kredit komersial. Penyaluran beras Bulog ke PNS/ABRI dihapus pada awal 2000, mereka dibebaskan memilih uang sebagai bagian dari gaji.

Pemerintah masih mempertahankan tarif spesifik sebesar Rp 430/kg yang diberlakukan sejak Januari 2000<sup>1</sup>. Impor diperketat, melalui jalur merah yang dikontrol agar tidak terjadi penyelundupan. Kemudian, sejak Januari 2004, pemerintah menutup impor beras, diperkirakan akan terus dipertahankan hingga akhir tahun ini. Kebijakan ini tentu kurang kompatibel dengan tatanan perdagangan multilateral. Pelarangan impor yang sering dipakai sekarang adalah lebih ilmiah yaitu dikaitkan dengan alasan kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Instrumen terakhir ini masuk dalam SPS (*sanitary and phytosanitary measures*) dalam tatanan perdagangan multilateral WTO.

Pada akhir 2005, Pemerintah ingin membuka kran impor sebanyak 250 ribu ton untuk mengisi stok beras nasional yang terus terkuras. Monopoli impor beras pun dikembalikan lagi kepada Bulog. Penutupan impor dan pemberian monopoli dalam periode tertentu bertujuan agar pemerintah dapat secara efektif mengisolasi pasar domestik dari pengaruh turunnya harga beras di pasar dunia. Pada waktu yang sama, stok beras dalam negeri diusahakan dalam jumlah yang aman yaitu antara 750 ribu ton-1 juta ton.

Namun, belit pemerintah tersebut ternyata setengah hati, karena derasnya penolakan dari sebagian anggota DPR-RI dan masyarakat, sehingga realisasi impor beras tidak sampai 100 ribu ton. Masyarakat mungkin masih kurang percaya kepada Bulog. Mereka ragu bahwa Bulog dapat mengemban tugas tersebut secara transparan, efisien dan penuh tanggungjawab. Disamping itu, adanya kesalahan antisipasi pemerintah yang telah menyulut spekulasi harga beras menjelang panen raya 2006. Pada musim paceklik, pemerintah meminta Bulog melakukan pengadaan dalam negeri. Pelaku pasar menganggap hal itu sebagai reaksi panic pemerintah, sehingga telah berpengaruh buruk terhadap stabilisasi harga.

Khusus tentang impor beras masih cukup ramai dibicarakan sampai sekarang, terutama para politisi. Seorang bekas Presiden dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) malah berpendapat, impor beras itu melukai hati rakyat. Tetapi rakyat mana dan hati sebelah mana yang terluka? Mengapa impor kedelai, jagung, gandum tetap diperbolehkan tanpa hambatan tarif, apakah petani kedelai atau jagung tidak luka dengan impor bebas, tanpa bea masuk? Apakah impor gandum yang tanpa tarif itu, tidak mendorong konsumen Indonesia lebih cepat beralih ke makanan yang berasal dari gandum, padahal kita tidak mampu memproduksikannya, devisa akan terkuras untuk impor biji/tepung gandum?

## **IMPOR DAN EKSPOR BERAS**

Indonesia telah menjadi negara net importir beras sejak lama. Pada periode 1998-99, terjadi penurunan produksi padi (El Nino) yang bersamaan dengan krisis ekonomi, sehingga impor beras tertinggi yaitu mencapai 3,8 juta ton/tahun, dengan tingkat ketergantungan impor hampir 11%. Namun, impor beras menurun drastis pada periode 2004-2005, karena Indonesia melarang impor beras, kecuali beberapa jenis beras untuk penggunaan tertentu (Tabel 1). Pada periode ini, impor hanya 206 ribu ton/tahun, dengan tingkat swasembada mencapai 99,5%. Dalam periode ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia juga mengekspor beras sebesar 22 ribu ton/tahun.

---

<sup>1</sup> Kebijakan ini ditempuh setelah bernegosiasi panjang dengan pihak IMF. Seorang menteri senior pada era Pemerintahan Abdul Rahman Wahid mengungkapkan bahwa ia harus rapat sampai lima kali untuk menggolkan kebijakan tarif tersebut. Ia mengatakan berhadapan dengan “anak-anak ingusan” dari IMF, yang dinilainya tidak paham tentang pertanian Indonesia, khususnya.

Tabel 1. Produksi, Impor/Ekspor Beras (1000 Ton), dan Tingkat Swasembada dan Ketergantungan impor: Rataan 4 periode 1995-2005

Rataan/ Tahun	Produksi	Impor	Ekspor	Tingkat Swasembada (%)	Tingkat Ketergantungan Impor (%)
1995-1997	32.252	1.920,1	3,5	94,6	5,4
1998-1999	31.633	3.844,9	4,2	89,3	10,7
2000-2003	32.356	1.310,0	2,9	96,1	3,9
2004-2005	34.174	205,5	21,6	99,5	0,5

Sumber :

- 1) Ekspor/impor dihitung dari data Neraca Bahan Makanan BPS (berbagai tahun) dan makalah BPS di Rakornas Inpres di Yogya tgl 1-2 Mei 2006. Lainnya, dari Statistik Indonesia BPS

Berbagai lembaga internasional mencatat juga impor beras oleh Indonesia, namun dalam jumlah yang lebih tinggi. Pada periode 2004-05 misalnya, rata-rata impor beras Indonesia dicatat oleh *The Rice Report* (TRR), *United States Department of Agriculture* (USDA) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO), masing-masing sebanyak 555 ribu ton, 575 ribu ton dan 650 ribu ton (Tabel 2). Apabila pemerintah melepas kontrol impor tahun ini, maka ke-3 lembaga itu memperkirakan Indonesia perlu impor beras mencapai 1 juta ton.

Table 2. Impor Beras Indonesia dari Berbagai Sumber Lembaga Internasional: 2003-2005 (000Ton)

Tahun	USDA	TRR	FAO <sup>1)</sup>
2003	2.750	2.779	2.500
2004-05 (Rataan/tahun)	575	555	650
2006 (Prakiraan)	1.000	1.000	1.000

Sumber:

- Data USDA dan TRR berasal dari *The Rice Report* (2006a, 2006b)  
Data FAO dari FAO (2006)

Apabila data impor beras BPS dibandingkan dengan data lembaga internasional, TRR misalnya, maka BPS mencatatnya jauh lebih rendah atau hanya sebesar 205 ribu ton, sedangkan TRR sebesar 555 ribu ton. Data BPS berasal dari dokumen yang disuplai oleh Ditjen Bea Cukai Depkeu. Padahal, berbagai pihak telah lama menduga munculnya impor ilegal, seperti penyelundupan, baik yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi, maupun melalui pelabuhan resmi namun *under invoice*. Oleh karena itu, data yang dilaporkan BPS cenderung *underestimate*.

Ambil saja perbandingan impor beras antara yang dilaporkan BPS dengan TRR, sebagai contohnya. TRR mencatat volume impor suatu negara berdasarkan dokumen yang berasal dari negara eksportir. Data ini tentu lebih tepat dalam menggambarkan keadaan sesungguhnya, dibandingkan dengan data yang berasal dari Bea Cukai dengan alasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Rataan impor per tahun dalam periode 2000-03, data BPS melaporkan 41% lebih rendah dari angka yang dicatat oleh TRR (Tabel 3). Sedangkan pada periode impor dilarang 2004-2005, malah angka yang dilaporkan BPS lebih rendah lagi atau 63% lebih rendah dari yang dicatat oleh TRR. Tingginya selisih harga dalam negeri dengan harga luar negeri, mendorong tingginya insentif untuk melakukan penyelundupan. Namun perlu dicatat bahwa jumlah beras yang diselundupkan ke Indonesia amat berkurang dalam rezim NTB dibandingkan dalam rezim TB. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih mampu melindungi industri padi/beras dari dari ancaman impor melalui NTB.

Table 3. Impor Beras Indonesia dari BPS lawan The RiceReport: Rataan/tahun dalam 3 periode 2000-05 (Ton)

Rataan/Tahun	BPS	TRR	Selisih (%)
2000-2003	1,308,600	2,340,002	- 41
2004-2005	205,500	554,500	- 63

Sumber: BPS (seperti Tabel 1), dan The Rice Report (2006a, 2006b)

## PENUTUP

Impor dan ekspor beras Indonesia terus berlangsung walaupun Indonesia telah melarang impor beras. Dalam jumlahnya, volume impor berkurang drastis, namun data impor yang tidak tercatat (secara relatif) meningkat dari 41% menjadi 63%. Dalam dua tahun terakhir ini, Indonesia hampir mampu 100% berswasembada beras. Pemerintahpun melemparkan sinyal bahwa impor beras akan dihentikan. Bahkan, Presiden telah mengeluarkan pernyataan tentang hal itu.

Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan mengisolasi pasar beras akan mempercepat kemakmuran petani. Seharusnya, pemerintah melihat inti persoalan dalam industri beras/padi nasional. Inti masalahnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengurangi secara signifikan tingkat kehilangan hasil padi/beras, mendorong berkembangnya penggilingan padi modern, sehingga Indonesia mampu menghasilkan beras yang berkualitas tinggi dan peningkatan rendemen giling.

Walaupun tidak berarti insentif harga tidak berguna, namun insentif non-harga haruslah diprioritaskan. Pada 2006, HPP telah mencapai setara US\$ 365/ton beras (Tabel Lampiran 1) atau 37% lebih tinggi dari tingkat harga beras di pasar internasional. Pada 2003, HD beras Indonesia 85% lebih tinggi dari harga beras di pasar dunia. Kalau HPP ingin dinaikkan lagi seperti yang direncanakan pemerintah, maka tingkat harga HPP akan lebih tinggi lagi, sehingga membuka peluang salah urus di border dan spekulasi harga beras dalam negeri menjadi tinggi, apalagi kalau impor beras tetap dilarang. Disamping itu, sekali HPP ditetapkan tinggi, maka kita akan terus terperangkap tidak mungkin untuk diturunkan. Oleh karena itu, perlu kearifan dalam memutuskannya.

Lebih baik kita alihkan yang lebih dominan ke insentif non-harga seperti yang telah diutarakan di atas.

Perkembangan harga padi/beras pada musim panen raya Februari-Juni ini terus meningkat, terutama di luar Jawa. Para pedagang, amat aktif menyerap gabah/beras masyarakat dan memupuk stok untuk memperoleh margin dalam perdagangan. Mereka akan terus memupuk stok, semakin intens menjelang musim paceklik. Pada musim paceklik itulah diperkirakan harga beras akan naik cukup tinggi, mereka ingin peroleh margin perdagangan yang tinggi (*super normal*). Diperkirakan pada waktu itu, harga beras eceran (kualitas medium) bisa mencapai rata-rata nasional di atas Rp 5.500/Kg. Spekulasi harga beras dalam bulan mendatang pasti akan terjadi. Tingginya harga beras relatif terhadap harga gandum, dalam jangka menengah akan mendorong konsumsi gandum yang lebih besar lagi, dan akan menguras devisa untuk impor gandum.

Adalah hampir tidak mungkin pemerintah mampu mengendalikan harga dalam negeri dan mencegah spekulasi harga, apabila pemerintah tidak memiliki instrumen impor atau ekspor beras. Disamping itu, pemerintah juga tidak punya daya, karena stok akhir tahun yang dikuasai Bulog rendah, sekitar 0,5 juta ton, padahal pada musim normal, stok akhir tahun berkisar antara 1,1-1,7 juta ton, dengan rata-rata 1,45 juta ton/tahun periode 2000-2005.

Harga beras nantinya akan dikendalikan oleh para pedagang/penggilingan padi, terutama pedagang besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan membuka pasar dan mengelola impor beras dengan bijaksana. Indonesia harus dapat merancang dan membangun infrastruktur serta SDM terutama di border. Tanpa itu TB tidak akan mampu direalisasikan secara efektif, sehingga kurang ampuh dalam melindungi industri dalam negeri, tidak hanya industri padi/beras. Semua industri dalam negeri memerlukan efektivitas penerapan tarif, sebagai instrumen perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B dan Husein Sawit, M (2001), Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi, (Edisi kedua), IPB Press: Bogor
- FAO (2006), Rice Market Monitor, Vol.IX, issue no.1 (March 2006)
- (2005a), Rice Market Monitor, Vol.VIII, Issue no.4 (December 2005)
- (2005b), Policies For Basic Food Commodities 2003-04, Commodities and Trade Division FAO: Rome
- Husein Sawit, M dan I.W. Rusastra (2005), "Globalisasi dan Ketahanan Pangan di Indonesia", bagian laporan penelitian Road Map Memperkuat Ketahanan Pangan, PEM UI, Jakarta
- The Rice Report (2006a), "The Rice Report", January 24, 2006
- (2006b), "The Rice Report", March 28, 2006

**DR. M. Husein Sawit, MSc**, Ahli Peneliti Utama (APU) bidang Kebijakan Pertanian di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Bogor. Menyelesaikan S1 (1974) Fakultas Ekonomi di UGM, S2 (1983) dalam bidang Agricultural Development Economics dari Australian National University (ANU), Canberra Australia dan S3 (1994) dalam bidang Economics dari University of Wollongong, NSW Australia.

Tabel Lampiran 1. HPP (harga pembelian pemerintah) atau HD (harga dasar) Beras dalam US\$ dan Perbandingan dengan Beras Harga Ekspor Thai 25%

Tahun	HPP atau HD Beras (Rp/Kg)	HPP atau HD <sup>1)</sup> Beras/Ton dlm US\$	Thai 25% <sup>2)</sup> (harga ekspor) US\$/Ton	HPP Beras thd Harga Ekspor Thai25% (%)	Procurement Price <sup>3)</sup> Thailand (sejak 2004)
2000	2,390	280	172	62.8	
2001	2,470	241	153	57.6	
2002	2,470	265	171	55.0	
2003	2,790	325	176	84.8	
2004	2,790	312	225	38.9	239
2005	2,790	287	259	11.0	239
2006	3,350	365	267	36.6	239

Keterangan:

- 1) Beras Medium (20% broken). Harga yang telah dikonversikan ke US\$ yang berasal dari kurs tengah BI
- 2) Beras Thailand (25% broken) berdasarkan harga ekspor rata-rata Jan-Jun 06 (Sumber FAO, Rice Market Monitor, up date July 2006)
- 3) Jaminan harga untuk kualitas Yasmin (*fragrant rice*) sejak 2004 (Sumber FAO, Rice Market Monitor, 2005b)